

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Pemediasi

Eza Putri Madyansyah<sup>1</sup>, Dwi Suhartini<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

20013010220@student.upnjatim.ac.id, dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research uses quantitative techniques to examine and evaluate the impact of the Revenue Sharing Fund and Special Allocation Fund on the Human Development Index using regional expenditure as a mediating variable. The East Nusa Tenggara region's 110 data points from 22 districts and cities between 2019 and 2023 served as the study's sample. Path analysis and multiple linear regression are the study approaches that are employed. The results of this study prove that increasing the amount of Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) can increase Regional Expenditure, besides that DBH is able to increase the Human Development Index (HDI), DAK and Regional Expenditure have not contributed to changes in HDI, and DAK and DBH have no impact on HDI through Regional Expenditure. This illustrates that the East Nusa Tenggara local government has optimized the allocation of Revenue Sharing Funds through extracting funds by utilizing the potential of natural resources and taxes as a strategy to improve the quality of the Human Development Index through improvements in education, health, and income levels.*

**Keywords:** *Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Regional Expenditure, Human Development Indeks*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk menguji dan mengevaluasi dampak Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan belanja daerah sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian ini adalah 110 titik data dari 22 kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sampai 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat meningkatkan Belanja Daerah, selain itu DBH mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DAK dan Belanja Daerah belum memberikan kontribusi terhadap perubahan IPM, serta DAK dan DBH tidak berdampak pada IPM melalui Belanja Daerah. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur telah mengoptimalkan alokasi Dana Bagi Hasil melalui penggalan dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pajak sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia melalui perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

**Kata Kunci:** Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia

## PENDAHULUAN

Konsep pembangunan manusia telah berkembang yang awalnya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidup menjadi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia secara substansial dan berkelanjutan. Faktanya untuk memperbaiki hal tersebut tidaklah mudah, karena terdapat beberapa masalah yang akan dihadapi. Untuk mengatasi masalah ini, kebijakan dibuat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM), sebuah indikator statistik yang menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah. (BPS RI, 2022).

Meskipun IPM di Indonesia berada di peringkat 114 dari 191 negara dengan nilai 0,75 (UNDP, 2022) dan meningkat sebesar 74,39 atau 0,84% dari tahun sebelumnya (BPS RI, 2023). Namun, pembangunan di Indonesia masih tidak merata. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa Jawa dan Bali akan memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi antara 2019 dan 2023, tetapi Papua dan Nusa Tenggara Timur akan memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah daripada daerah lainnya. Akibatnya, fokus penelitian adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Peneliti tidak memasukkan Papua karena, seperti yang dilansir dari *website* JDIIH Kemenkeu, provinsi tersebut menerima bantuan dana otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah dengan penerimaan khusus dalam artian dana otonomi khusus untuk mendanai kegiatan yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah.



**Gambar 1. IPM Per Pulau di Indonesia**

Sumber: *website* Badan Pusat Statistik (diolah peneliti 2024)  
<https://www.bps.go.id>

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah menerapkan kebijakan terkait desentralisasi fiskal. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilansir dari laman BPK, Desentralisasi fiskal berarti bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah di Indonesia untuk mengelola dan mengelola pemerintahan. Pemerintah pusat juga

memberikan APBN dalam bentuk dana transfer, yang kemudian diberikan kepada daerah untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. (Natasya dkk., 2022).

Dilansir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang diperuntukkan untuk membiayai program, kegiatan, dan kebijakan khusus serta bantuan penyelenggaraan pelayanan publik di suatu daerah. Menurut *website* DJPK Kemenkeu, Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, adalah sumber pendapatan APBN tambahan yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka desentralisasi. Selain itu, dana yang ditransfer dari pusat ke daerah juga dikenal sebagai Belanja Daerah yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan di daerahnya. (Hasbullah dkk., 2021). Meskipun desentralisasi fiskal telah diterapkan, masih ada masalah tentang alokasi dan realisasi dari dana transfer dan belanja daerah.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan peran pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Meilani dkk., (2024) mengatakan bahwa pemerintah daerah harus menggunakan teori ini karena masyarakat bergantung pada pemerintah daerah untuk mengawasi semua pengelolaan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Hendri & NR (2020) juga menyatakan bahwa penerapan teori *stewardship* untuk menjelaskan peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakatnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAK dan DBH terhadap IPM melalui belanja daerah sebagai variabel pemediasi. Penelitian yang telah dilakukan Siburian dkk., (2021) menyatakan bahwa IPManusia dipengaruhi positif oleh DAK, sedangkan DBH mempengaruhi negatif. Kemudian penelitian Mbuinga dkk., (2022) menyatakan bahwa DAK berdampak positif pada belanja daerah, tetapi DBH berdampak negatif. Makbul (2019) menyatakan bahwa IPM dipengaruhi oleh Belanja Daerah tetapi tidak signifikan. Penelitian Hartika & Dithisari (2022) menemukan bahwa Belanja Daerah mampu memediasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap IPM.

Terkait dengan penjelasan ini, muncul pertanyaan apakah DAK dan DBH dapat mempengaruhi IPM dengan menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel pemediasi. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil adalah variabel independen dalam penelitian ini, dan Indeks Pembangunan Manusia adalah variabel dependen dan Belanja Daerah adalah variabel mediasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil di Nusa Tenggara Timur selama periode 2019-2023 sebagai objek penelitian. Penelitian ini melibatkan 395 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa dan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* yang berarti peneliti hanya mengambil sampel dari jenis tertentu. Sehingga sampel yang didapat sejumlah 22 Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berjumlah 110 data dan menggunakan SPSS 25.0 dengan teknik analisis regresi linier berganda dan analisis jalur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil akumulasi data sekunder wilayah Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2019-2023 yang disajikan dalam bentuk statistik deskriptif kemudian diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Dana Alokasi Khusus	110	100.70	496.33	214.20	73.6014
Dana Bagi Hasil	110	4.05	37.05	10.71	5.3502
Belanja Daerah	110	324.95	1497.05	985.65	231.7065
Indeks Pembangunan Manusia	110	56.66	80.62	64.59	4.1444

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS 25(2024)

Dari tabel 1, nilai minimum 100,70; nilai maksimum 496,33; rata-rata 214,20; dan standar deviasi 73,6014 untuk variabel DAK ( $X_1$ ). Untuk variabel DBH ( $X_2$ ) nilai minimum 4,05; nilai maksimum 37,05; rata-rata 985,65; dan standar deviasi 5,3502. Untuk variabel Belanja Daerah ( $Z$ ) nilai minimum 324,95; nilai maksimum 1497,05; rata-rata 985,65; dan standar deviasi 231,7065. Untuk variabel IPM ( $Y$ ) nilai minimum 56,66; nilai maksimum 80,62; rata-rata sebesar 64,59; dan standar deviasi 4,1444.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Tabel 2. Uji Kolmogorov Smirnov DAK (X<sub>1</sub>) dan DBH (X<sub>2</sub>) terhadap BD (Z)**

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25(2024)

Menurut tabel 2 dari uji Kolmogorov dapat dilihat bahwa residual data yang diperoleh terdistribusi normal. Bisa dilihat dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* = 0,200 lebih besar dari 0,05. Tidak ada gejala normalitas dalam penelitian, dan hal tersebut memenuhi kriteria.

**Tabel 3. Uji Kolmogorov Smirnov DAK (X<sub>1</sub>), DBH (X<sub>2</sub>), dan BD (Z) terhadap IPM (Y)**

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Menurut tabel 3, hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa residual data yang diperoleh terdistribusi normal. Sebagai bukti, *Asymp. Sig (2-tailed)* = 0,200 > 0,05. Tidak ada gejala normalitas dalam penelitian, dan hal tersebut memenuhi kriteria.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas DAK (X<sub>1</sub>) dan DBH (X<sub>2</sub>) terhadap BD (Z)**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Khusus	0,998	1,022
Dana Bagi Hasil	0,998	1,022

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Menurut tabel 4, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sebab nilai toleransi dari variabel independen >0,1, yaitu 0,998 (DAK) dan 0,998 (DBH), dan nilai VIF untuk masing-masing variabel independen lebih rendah dari 10.

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas DAK (X<sub>1</sub>), DBH (X<sub>2</sub>), dan BD (Z) terhadap IPM (Y)**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Alokasi Khusus	0,611	1,635
Dana Bagi Hasil	0,854	1,171
Belanja Daerah	0,565	1,771

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Menurut tabel 5, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sebab nilai toleransi dari variabel independen >0,1, yaitu 0,611 (DAK), 0,854 (DBH), dan 0,565 (BD), dan nilai VIF masing-masing lebih rendah dari 10 yaitu 1,635 (DAK), 1,171 (DBH), dan 1,771 (BD).

**Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 6. Uji Gletsjer DAK (X<sub>1</sub>) dan DBH (X<sub>2</sub>) terhadap BD (Z)**

Model	Collinearity Statistic
	Sig
X <sub>1</sub> Dana Alokasi Khusus	0,119
X <sub>2</sub> Dana Bagi Hasil	0,797

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Hasil pengujian heteroskedastisitas dari variabel independen menunjukkan tingkat signifikansi >0,050, yaitu 0,119 dan 0,797. Ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam hubungan antara variabel independen.

**Tabel 7. Uji Gletsjer DAK (X<sub>1</sub>), DBH (X<sub>2</sub>), dan BD (Z) terhadap IPM (Y)**

Model	Collinearity Statistic
	Sig
X <sub>1</sub> Dana Alokasi Khusus	0,860
X <sub>2</sub> Dana Bagi Hasil	0,082
Z Belanja Daerah	0,078

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Menurut hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditunjukkan dalam tabel 7, menunjukkan tingkat signifikansi >0,050. Ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam hubungan antara variabel independen. Kedua model penelitian menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 8. Uji Durbin-Watson DAK (X<sub>1</sub>) dan DBH (X<sub>2</sub>) terhadap BD (Z)**

Durbin-Watson	Keterangan
1.620	Non Autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Hasil pengujian autokorelasi, yang ditunjukkan dalam tabel 8, menunjukkan bahwa nilai uji Durbin-Watson sebesar 1,620. Merujuk (Field, 2017:221) apabila nilai D-W berada di antara kriteria 1 dan DW 3, maka tidak ada autokorelasi. Nilai DW 1 dan 1,620, yang diperoleh dalam model regresi ini, menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

**Tabel 9. Uji Durbin-Watson DAK (X<sub>1</sub>), DBH (X<sub>2</sub>), dan BD (Z) terhadap IPM (Y)**

Durbin-Watson	Keterangan
1.296	Non Autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Berdasarkan tabel 9, hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa pada hasil uji Durbin-Watson, ada hubungan sebesar 1,296. Merujuk (Field, 2017:221) apabila nilai D-W berada di antara kriteria 1 dan DW 3, maka tidak ada autokorelasi. Nilai DW 1,296,3 yang diperoleh dalam model regresi ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gejala autokorelasi tidak ditemukan pada kedua model regresi.

**Uji Hipotesis**

**Uji Hipotesis Pengaruh Langsung**

**Uji Koefisien Determinasi Analisis Jalur I**

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinan Analisis Jalur I**

Model	R	R Square
1	.685	.469

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Nilai R-square menunjukkan pengaruh DAK dan DBH terhadap belanja daerah sebesar 0,469. Ini menunjukkan bahwa realisasi DAK dan DBH sebesar 46,93% mempengaruhi belanja daerah, sementara nilai e1 berasal dari variabel lain yang bukan variabel penelitian atau nilai *error term*. Nilai e1 diperoleh dengan menggunakan  $\sqrt{(1-0,469)} = 0$ .

**Uji Koefisien Determinasi Analisis Jalur II**

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinan Analisis Jalur II**

Model	R	R Square
1	.660	.425

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Z$  terhadap  $Y$  adalah 0,435 menurut besaran nilai  $R^2$ . Ini menunjukkan bahwa 43,5 persen dari realisasi DAK, DBH, dan belanja daerah memengaruhi IPM, sementara 56,5 persen lainnya berasal dari variabel lain yang bukan variabel penelitian atau nilai *error term*. Nilai  $e^2$  dapat dihitung dengan  $\sqrt{(1-0.435)} = 0,565$ .

**Analisis Jalur I**

**Tabel 12. Hasil Uji Analisis Jalur Model I**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	439.147	63.092		6.960	.000
Dana Alokasi Khusus	1.882	.229	.598	8.222	.000
Dana Bagi Hasil	13.372	3.149	.309	4.246	.000

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Mengacu pada tabel 12 dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Z = 439,147 + 1,882 + 13,372 + e$$

**Uji Parsial I (t)**

Untuk mengetahui tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dengan signifikan koefisien alpha sebesar 5%, yang ditemukan dalam perhitungan derajat kebebasan,  $df = n - (k-1) = 110 - (2-1) = 109$ , maka  $t_{tabel}$  diperoleh 1,65895. Berdasarkan tabel 12, hasil pengujian variabel DAK terhadap belanja daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  8,222 dan nilai  $t_{tabel}$  1,65895 atau  $8,222 < 1,65895$ , dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Selanjutnya, hasil pengujian variabel DBH terhadap belanja daerah menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  4,246 dan nilai  $t_{tabel}$  1,65895 atau  $4,246 < 1,65895$ , dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Hal ini membuktikan DAK dan DBH mempengaruhi belanja daerah.

**Analisis Jalur II**

**Tabel 13. Hasil Uji Analisis Jalur Model II**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	58.091	1.325			43.836	.000
Dana Alokasi Khusus	-.004	.005	-.077		-.851	.397
Dana Bagi Hasil	.497	.059	.642		8.381	.000
Belanja Daerah	.002	.002	.119		1.268	.208

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 25 (2024)

Mengacu pada tabel 13, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_3X_1 + \beta_4X_2 + \beta_5Z + e$$

$$Y = 58,091 + (-0,004) + 0,497 + 0,002 + e$$

**Uji Parsial II (t)**

Untuk mengetahui tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dengan signifikan koefisien alpha sebesar 5%, yang diketahui melalui perhitungan derajat kebebasan yang dijelaskan dalam  $df = n - (k-1) = 110 - (3-1) = 108$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,65909. Menurut tabel 13, hasil pengujian variabel DAK terhadap IPM menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  -0,851 dan nilai  $t_{tabel}$  1,65909 atau  $-0,851 < 1,65909$ , dengan tingkat signifikansi  $0,397 > 0,05$ . Selanjutnya, uji variabel DBH terhadap IPM mendapatkan nilai  $t_{hitung}$  8,381 dan nilai  $t_{tabel}$  1,65909 atau  $8,381 > 1,65909$  dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Pengujian variabel belanja daerah terhadap IPM menemukan nilai  $t_{hitung}$  1,268 dan nilai  $t_{tabel}$  1,65909 atau  $1,268 < 1,65909$ , dengan tingkat signifikansi  $0,208 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa IPM tidak terpengaruh secara signifikan oleh DAK dan BD, namun berpengaruh signifikan oleh DBH.

**Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung**

1. Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung pada masing-masing variabel, dapat disusun model pengujian pengaruh tidak langsung untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja daerah, yaitu:
  - a. Pengaruh langsung  $X_1$  terhadap  $Y = -0,077$
  - b. Pengaruh tidak langsung  $X_1$  ke  $Z$  terhadap  $Y = 0,598 \times 0,119 = 0,071$
  - c. Pengaruh total  $X_1$  terhadap  $Y = -0,077 + 0,071 = -0,006$

$$\begin{aligned}
 sab &= \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2} \\
 &= \sqrt{0,119^2 0,229^2 + 0,598^2 0,002^2 + 0,229^2 0,002^2} \\
 &= \sqrt{0,000742617 + 0,00000143042 + 0,00000020976} \\
 &= \sqrt{0,00074425718} \\
 &= 0,027281
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, kemudian dilakukan uji statistik pengaruh mediasi melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{ab}{sab} \\
 &= \frac{0,071}{0,027281} \\
 &= 2,6025
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditemukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 2,6025 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,65895 atau  $2,6025 > 1,65895$ , dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, koefisien mediasi sebesar 0,071 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini berarti bahwa pengaruh DAK terhadap IPM tidak dapat dimediasi oleh variabel belanja daerah.

2. Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung pada masing-masing variabel penelitian, dapat disusun model pengujian pengaruh tidak langsung untuk menguji pengaruh DBH terhadap IPM melalui belanja daerah, yaitu:
  - a. Pengaruh langsung  $X_2$  terhadap  $Y = 0,642$
  - b. Pengaruh tidak langsung  $X_2$  ke  $Z$  terhadap  $Y = 0,309 \times 0,119 = 0,03677$
  - c. Pengaruh total  $X_2$  terhadap  $Y = 0,642 + 0,036771 = 0,67877$

$$\begin{aligned}
 sab &= \sqrt{b^2sa^2 + a^2sb^2 + sa^2sb^2} \\
 &= \sqrt{0,03677^2 3,149^2 + 0,309^2 0,002^2 + 3,149^2 0,002^2} \\
 &= \sqrt{0,01340775924 + 0,00000038192 + 0,0000396648} \\
 &= \sqrt{0,01344780596} \\
 &= 0,115964
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, kemudian dilakukan uji statistik pengaruh mediasi melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned}t &= \frac{ab}{sab} \\ &= \frac{0,03677}{0,115964} \\ &= 0,317087\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, ditemukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 0,317087 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,65909 atau  $0,317087 < 1,65909$ , dengan tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi sebesar 0,03677 tidak memiliki dampak. Ini berarti bahwa pengaruh DBH terhadap IPM tidak dapat dimediasi oleh variabel belanja daerah.

## **Pembahasan Hasil**

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan SPSS, ditemukan bahwa DAK berdampak positif pada alokasi belanja daerah. Hipotesis pertama, "Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah", dapat diterima karena menunjukkan bahwa nilai realisasi DAK yang tinggi atau rendah akan berdampak pada belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadilah & Helmayunita (2020) dan Mbuinga dkk., (2022) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Dewi (2019) menyatakan bahwa DAK dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan publik dalam hal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelangsungan hidup, dan sarana prasarana pemerintah daerah.

### **Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapati bahwa DBH berdampak positif pada belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua, "Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah," dapat diterima. Dengan kata lain, belanja daerah dapat dipengaruhi oleh nilai realisasi DBH yang tinggi atau rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadilah & Helmayunita (2020) dan Melda & Syofyan (2020) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Selain itu, Safa'ah dkk., (2021) juga menyatakan bahwa salah satu modal pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah adalah DBH. Selain dari PAD, DAK, dan DAU, DBH juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup berpotensi.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapati bahwa realisasi DAK tidak mempengaruhi IPM. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang

disebut sebagai "Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia" tidak dapat diterima. Dalam hal ini, nilai realisasi DAK yang meningkat atau menurun tidak akan mempengaruhi nilai IPM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, (2019) dan Wati dkk., (2023) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Rosmadayanti dkk., (2021) juga menyatakan bahwa IPM mencakup sarana dan prasarana serta kualitas hidup manusia namun DAK lebih banyak digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

### **Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapat hasil bahwa realisasi DBH memengaruhi IPM. Dengan demikian, hipotesis keempat "Dana Bagi Hasil memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia" dapat diterima. Hipotesis ini menyatakan bahwa nilai IPM akan dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan nilai realisasi DBH. Hasil yang didapat selaras dengan penelitian dan Ina & Hudang (2024) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap IPM. Sehubungan dengan hal tersebut Ina & Hudang (2024) berpendapat bahwa dengan meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan maka DBH dapat meningkatkan IPM.

### **Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapati bahwa belanja daerah tidak mempengaruhi IPM, sehingga hipotesis kelima "Belanja Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia," tidak dapat diterima. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rangkuty dkk., (2022) dan Dzulkornain (2022) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Artinya naik turunnya nilai realisasi dari belanja daerah tidak akan mempengaruhi naik turunnya nilai IPM. Selain itu, Ginting dkk., (2024) belanja daerah memang mencakup sejumlah besar pengeluaran, tetapi tidak selalu berdampak pada pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan indikator IPM.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapat kesimpulan bahwa IPM tidak dipengaruhi oleh DAK melalui belanja daerah. Dengan demikian, hipotesis keenam "Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Daerah," tidak dapat diterima karena naik turunnya nilai realisasi DAK tidak berdampak pada naik turunnya nilai IPM. Hasil penelitian ini bertentangan penelitian Hartika & Dithisari (2022) yang menyatakan bahwa hubungan antara dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum,

dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dengan IPM dapat dimediasi oleh belanja daerah.

### **Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan penggunaan SPSS, mendapat hasil bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM melalui belanja daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh, "Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Daerah," tidak dapat diterima karena nilai DBH yang melalui belanja daerah tidak memberikan dampak pada nilai IPM. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hartika & Dithisari (2022) yang mengatakan belanja daerah dapat memediasi hubungan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil dengan IPM.

### **KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti tentang bagaimana pengaruh dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja daerah sebagai variabel mediasi. Studi ini dilakukan pada tahun 2019–2023 di Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis data dan diskusi yang dibahas dalam Bab IV:

1. Peningkatan jumlah dana alokasi khusus akan berdampak terhadap peningkatan belanja daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, semakin tinggi nilai realisasi dana alokasi khusus, maka semakin tinggi pula nilai belanja daerah yang direalisasikan.
2. Jumlah dana bagi hasil yang meningkat akan berimbas terhadap meningkatnya nilai belanja daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, semakin tinggi nilai realisasi dana bagi hasil, maka semakin tinggi pula nilai belanja daerah yang direalisasikan.
3. Nilai dari dana alokasi khusus belum memberikan dampak terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, ada atau tidaknya dana alokasi khusus tidak berdampak nilai indeks pembangunan manusia.
4. Kenaikan jumlah dana bagi hasil akan berimbas terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, nilai realisasi dana bagi hasil yang meningkat akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia.
5. Belum adanya dampak belanja daerah terhadap nilai indeks pembangunan manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, nilai indeks pembangunan manusia tidak bergantung pada ada dan tidaknya belanja daerah.

6. Belanja daerah tidak dapat memediasi hubungan antara dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan kata lain, alokasi dana alokasi khusus yang direalisasikan dalam belanja daerah tidak dapat memberikan pengaruh terhadap nilai indeks pembangunan manusia.
7. Hubungan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia tidak dapat dimediasi oleh belanja daerah. Dengan kata lain, alokasi dana bagi hasil yang direalisasikan dalam belanja daerah tidak memberikan dampak terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran penelitian, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya juga mengeksplor faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Penelitian selanjutnya agar menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel independen bukan sebagai variabel mediasi guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap variabel dependen yang diteliti.
3. Penelitian selanjutnya agar dapat memperluas atau mengganti cakupan sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada wilayah Nusa Tenggara Timur, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia atau wilayah lain selain Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS RI. (2022). Laporan Indeks Pembangunan Manusia. <https://www.bps.go.id/id>
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat. *Journal of Economic*, 01(04), 1–19. <https://doi.org/10.25181/esai.v17i2.2933>
- Dzulqornain, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur (Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>

- Field, A. (2017). Discovering Statistic Using IBM SPSS Statistic 5th. *Dk*, 53(9), 1689–1699.
- Ginting, E. M., Pulungan, F. A., Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Maipita, I., & Rinaldi, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.24036/ecosains.11813157.00>
- Hartika, L. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 189–198. <https://doi.org/10.30596/11896>
- Hasbullah, Y., Fatimah, S., & Handayani, S. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2018. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 143–173. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.73>
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Ilham, M. (2019). Analisis Pengaruh ZIS, Belanja Daerah, Kemiskinan dan PDRB Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 19 Provinsi Indonesia Periode 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 7(2), 1. <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/1068/indeks-pembangunan-manusia--ipm--jawa-timur-tahun-2018.html>
- Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Dana Bagi Hasil , Dana Alokasi Umum , dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718>
- Indonesia, N. R. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *UU Ni 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus*, September, 1–2. [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf)
- Indonesia, P. R. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

- Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203–3213. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3385>
- Meilani, D., Yulina, B., & Oktarida, A. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10 (1). <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1306>
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Melgiana, A. C., Rupa, I. W., & Riasning, N. P. (2020). (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Natasya, A. A., Sari, K. R., & Fithri, E. J. (2022). Pengaruh Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Sumatera Selatan. 10–30. <https://eco.ojs.co.id/index.php/jed/article/view/248/286>
- Rangkuty, D. M., Yusuf, M., & Pasaribu, R. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11813157.00>
- Rosmadayanti, D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 2. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.284>
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 1(4), 288–298. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/37>
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>
- UNDP. (2022). *Report 2021/2022*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/...report.../hdr2021->

22pdf\_1.pdf

Wati, E. J. S., Ridwansyah, E., & Dewi, A. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 17(2), 136–147. <https://doi.org/10.25181/esai.v17i2.2933>